



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA**

**( RENJA )**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2018**

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN KENARI NO.56 YOGYAKARTA 55165 (0274)

515867,586795,515866.

Fax. (0274) 586795.

EMAIL : pu@jogjakota.go.id



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud Dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	9
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	19
3.3 Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2017.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2018 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2017 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah ***“Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto”***. Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

- 1.2.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- 1.2.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1.2.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ;
- 1.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
- 1.2.5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- 1.2.6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 1.2.7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
- 1.2.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.16 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;
- 1.2.18 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
- 1.2.19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2018.
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### A. Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman,

keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU**

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan

---

tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD  
Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- C. Program dan Kegiatan  
Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

---

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Pelaksanaan Renja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah tahun 2016, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016

#### 1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2016 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 10 (sepuluh) program terdapat 1 (satu) program yang tidak mencapai 100 % yaitu Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase dari target 100 % hanya tercapai

69,41 %, karena untuk mencapai target ternyata anggarannya tidak mencukupi, keterbatasan anggaran belum bisa mengatasi permasalahan titik genangan di seluruh wilayah kota, sedangkan titik genangan dari tahun ke tahun selalu ada dan terdapat titik genangan baru, dengan keterbatasan anggaran sehingga pembangunan sistem drainase dilakukan secara bertahap. Namun capaian dari target 2 (dua) kegiatan dalam program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase yaitu Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase dan Pemeliharaan Saluran Drainase telah mencapai 100 %.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan**

Dari 10 (sepuluh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 9 (sembilan) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

- 2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
- 2.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2.4 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
- 2.5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 2.6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah
- 2.7 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
- 2.8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
- 2.9 Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

## **3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- 3.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah
- 3.2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## **4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan**

- 4.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :
  - 4.1.1 Keterbatasan Anggaran
  - 4.1.2 Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan

- 4.2 Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :
- 4.2.1 Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
- 4.2.2 Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)
- 4.2.3 Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra**

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

**6. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Akhir Tahun 2016 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel )

**2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar hukum penerapan SPM pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta adalah :

- A Bidang PePerumahan adalah berdasarkan Peraturan MENPERA No.22/PERMEN/M/ Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat . Jenis SPM di bidang Perumahan adalah :

1. Pelayanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau, dengan kriteria :
  - a Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan.
  - b Kecakupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
  - c Kecakupan rumah dengan harga terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa.
  - d Batas waktu pencapaian SPM untuk tahun 2013 adalah sebesar 80%.
  
2. Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
  
- B. Bidang Pekerjaan Umum adalah berdasarkan Peraturan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
  - Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :
    - 1.Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.
    - 2.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kota.
  
  - Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :
    - 1.Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang :
    - 2.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.
  
  - Penyediaan sanitasi dengan indikator :
    - 1.Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
    - 2.Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
    - 3.Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
    4. Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota
  
- C. Bidang Perhubungan Daerah adalah berdasarkan Peraturan MENTERI PERHUBUNGAN No.PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota . Jenis SPM di bidang Perhubungan adalah Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas

Perlengkapan Jalan berupa Penerangan Jalan Umum dengan nilai indikator SPM 60 % dengan batas waktu pencapaian Tahun 2014 termaksud indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Kota Yogyakarta

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi s
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>SPM BIDANG PERUMAHAN</b>											
1.	SPM Pelayanan Lingkungan Yang Sehat dan Aman didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	-	-	4 %	2 %	8 %	2 %	8 %	64 %	68 %	Batas waktu pencapaian tahun 2025
	<b>SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1.	Pelayanan Kondisi Jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60 %	-	4 %	4 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	78 %	79 %	
2.	Pelayanan air minum dengan jaringan non perpipaan	80 %	-									
3.	Pelayanan sistem air limbah setempat yang memadai	60 %	-									
4.	Pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan /Kota	80%	-									
5.	Pelayanan sitem jaringan	50 %	-	-								

	drainase skala kawasan dan Skala kota											
	<b>SPM BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH</b>											
1.	Fasilitas perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum (PJU ) pada jalan kota	60 %	-									

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

#### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan ,dan bangunan gedung pemerintah yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- a. Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- b. Pengelolaan kebinamargaan .
- c. Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- d. Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .

- e. Pengelolaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum .
- f. Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

#### **a. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Berkaitan dengan ketugasan teknis pada dinas kimpraswil :

- d. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- e. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- f. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.

- 
- g. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
  - h. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
  - i. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
  - j. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
  - k. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
  - l. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
  - m. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
  - n. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 60 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 204 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.
- b. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional**

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “ *Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto* “

**c. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk

meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang
- 4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
- 5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
- 6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengoptimalkan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

**e. Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2017, yaitu :

1. Program yang berkaitan dengan perencanaan ,pelaksanaan,pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
  - a) Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
  - b) Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
2. Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman ,sanitasi permukiman,perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
  - a). Penataan Perumahan dan Permukiman

- 
- b] Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - c] Pengelolaan Rusunawa
  - d] Pengelolaan Air Limbah
3. Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dengan kegiatan :
- a] Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - b] Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - c] Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
4. Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
- a] Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
  - b] Pembangunan Gedung Pemerintah

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih

mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.4 berikut. : **Pada Excel**

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2016, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran .

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas .
- b. Usulan masyarakat langsung
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

( dalam excel)

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Meningkatkan kualitas penyediaan jaringan jalan dan Jembatan serta bangunan pelengkap jalan
- Meningkatkan keandalan sistem pengelolaan sumber daya air
- Meningkatkan fasilitasi penyediaan sanitasi secara optimal
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  
- Mewujudkan kualitas penerangan jalan ,panel jaringan serta lampu hias kota yang memadai,berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan

#### **2. Sasaran**

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Terwujudnya pengelolaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan agar memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas.
- Terwujudnya pengelolaan saluran pengairan /penyediaan bangunan talud agar memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan sistem drainase perkotaan yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan saluran air limbah yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya penyediaan rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya penyediaan penerangan jalan , panel jaringan dan lampu hias kota
- Terpenuhinya bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2012-2016 b, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2017 adalah sebanyak 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi .
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

- a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan
- b. Pemeliharaan Saluran Pengairan

- c. Peningkatan dan Pembangunan Talud
- d. Pemeliharaan Bangunan Talud

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
- b. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

- a. Penataan Perumahan dan Permukiman
- b. Penataan Bangunan dan Permukiman
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Pengelolaan Rusunawa
- e. Pengelolaan Saluran Air Limbah

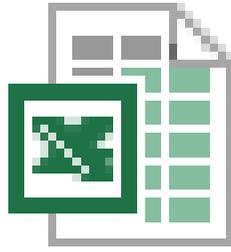
( tabel 3.1 ) Tabel rumusan program dan Kegiatan ,dalam excel

## **BAB IV PENUTUP**

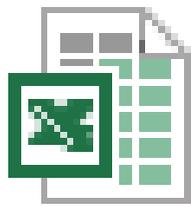
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2015 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

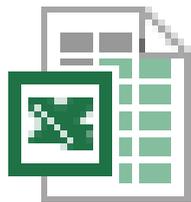
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.



## Renja 2018 Tabel 2.1.xls



## Renja 2018 Tabel 2.4.xls



## Renja 2018 Tabel 2.3.xls

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2017.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2018 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2017 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah ***“Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto”***. Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

- 1.2.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- 1.2.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1.2.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ;
- 1.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
- 1.2.5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- 1.2.6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 1.2.7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
- 1.2.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.16 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;
- 1.2.18 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
- 1.2.19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2018.
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja

---

Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD  
Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD  
Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD  
Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM,

asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD  
Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- C. Program dan Kegiatan  
Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Pelaksanaan Renja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah tahun 2016, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016

#### 1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2016 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 10 (sepuluh) program terdapat 1 (satu) program yang tidak mencapai 100 % yaitu Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase dari target 100 % hanya tercapai

69,41 %, karena untuk mencapai target ternyata anggarannya tidak mencukupi, keterbatasan anggaran belum bisa mengatasi permasalahan titik genangan di seluruh wilayah kota, sedangkan titik genangan dari tahun ke tahun selalu ada dan terdapat titik genangan baru, dengan keterbatasan anggaran sehingga pembangunan sistem drainase dilakukan secara bertahap. Namun capaian dari target 2 (dua) kegiatan dalam program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase yaitu Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase dan Pemeliharaan Saluran Drainase telah mencapai 100 %.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan**

Dari 10 (sepuluh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 9 (sembilan) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

- 2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
- 2.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2.4 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
- 2.5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 2.6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah
- 2.7 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
- 2.8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
- 2.9 Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

## **3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- 3.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah
- 3.2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## **4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan**

- 4.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :
  - 4.1.1 Keterbatasan Anggaran
  - 4.1.2 Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan

4.2 Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :

4.2.1 Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan

4.2.2 Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)

4.2.3 Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

#### **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra**

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

#### **6. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Akhir Tahun 2016 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel )

### **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar hukum penerapan SPM pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta adalah :

- A Bidang PePerumahan adalah berdasarkan Peraturan MENPERA No.22/PERMEN/M/ Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat . Jenis SPM di bidang Perumahan adalah :

1. Pelayanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau, dengan kriteria :
  - a Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan.
  - b Kecakupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
  - c Kecakupan rumah dengan harga terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa.
  - d Batas waktu pencapaian SPM untuk tahun 2013 adalah sebesar 80%.
  
2. Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
  
- B. Bidang Pekerjaan Umum adalah berdasarkan Peraturan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
  - Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :
    - 1.Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.
    - 2.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kota.
  
  - Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :
    - 1.Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang :
    - 2.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.
  
  - Penyediaan sanitasi dengan indikator :
    - 1.Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
    - 2.Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
    - 3.Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
    4. Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota
  
- C. Bidang Perhubungan Daerah adalah berdasarkan Peraturan MENTERI PERHUBUNGAN No.PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota . Jenis SPM di bidang Perhubungan adalah Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas

Perlengkapan Jalan berupa Penerangan Jalan Umum dengan nilai indikator SPM 60 % dengan batas waktu pencapaian Tahun 2014 termaksud indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Kota Yogyakarta

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>SPM BIDANG PERUMAHAN</b>											
1.	SPM Pelayanan Lingkungan Yang Sehat dan Aman didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	-	-	4 %	2 %	8 %	2 %	8 %	64 %	68 %	Batas waktu pencapaian tahun 2025
	<b>SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1.	Pelayanan Kondisi Jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60 %	-	4 %	4 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	78 %	79 %	
2.	Pelayanan air minum dengan jaringan non perpipaan	80 %	-									
3.	Pelayanan sistem air limbah setempat yang memadai	60 %	-									
4.	Pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan /Kota	80%	-									
5.	Pelayanan sitem jaringan	50 %	-	-								

	drainase skala kawasan dan Skala kota											
	<b>SPM BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH</b>											
1.	Fasilitas perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum (PJU ) pada jalan kota	60 %	-									

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

#### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan ,dan bangunan gedung pemerintah yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- a. Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- b. Pengelolaan kebinamargaan .
- c. Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- d. Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .

- e. Pengelolaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum .
- f. Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

#### **a. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Berkaitan dengan ketugasan teknis pada dinas kimpraswil :

- d. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- e. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- f. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.

- 
- g. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
  - h. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
  - i. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
  - j. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
  - k. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
  - l. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
  - m. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
  - n. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 60 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 204 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.
- b. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional**

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “ *Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto* “

**c. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk

meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselesaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang
- 4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
- 5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
- 6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengoptimalkan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

**e.Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2017, yaitu :

1. Program yang berkaitan dengan perencanaan ,pelaksanaan,pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
  - a) Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
  - b) Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
2. Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman ,sanitasi permukiman,perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
  - a). Penataan Perumahan dan Permukiman

- 
- b] Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - c] Pengelolaan Rusunawa
  - d] Pengelolaan Air Limbah
3. Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dengan kegiatan :
- a] Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - b] Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - c] Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
4. Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
- a] Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
  - b] Pembangunan Gedung Pemerintah

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih

mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.4 berikut : **Pada Excel**

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2016, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran .

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas .
- b. Usulan masyarakat langsung
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

( dalam excel)

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

##### **1. Tujuan**

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Meningkatkan kualitas penyediaan jaringan jalan dan Jembatan serta bangunan pelengkap jalan
- Meningkatkan keandalan sistem pengelolaan sumber daya air
- Meningkatkan fasilitasi penyediaan sanitasi secara optimal
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Mewujudkan kualitas penerangan jalan ,panel jaringan serta lampu hias kota yang memadai,berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan

## 2. Sasaran

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Terwujudnya pengelolaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan agar memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas.
- Terwujudnya pengelolaan saluran pengairan /penyediaan bangunan talud agar memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan sistem drainase perkotaan yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan saluran air limbah yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman yang memadai dan berkualitas
- Terwujudnya penyediaan rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya penyediaan penerangan jalan , panel jaringan dan lampu hias kota
- Terpenuhinya bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan

## 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2012-2016 b, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2017 adalah sebanyak 7 (tujuh) program dengan 13 ( tiga belas ) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi .
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

- a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan
- b. Pemeliharaan Saluran Pengairan
- c. Peningkatan dan Pembangunan Talud
- d. Pemeliharaan Bangunan Talud

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
- b. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

- a. Penataan Perumahan dan Permukiman
- b. Penataan Bangunan dan Permukiman
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Pengelolaan Rusunawa
- e. Pengelolaan Saluran Air Limbah

( tabel 3.1 ) Tabel rumusan program dan Kegiatan ,dalam excel

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2015 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.